



DINASTI POLITIK:

Transformasi Demokrasi Pancasila dalam Konteks Kekuasaan Keluarga

Tanuri, Asep Maskur, Subhan Alba

Universitas Ibnu Chaldun

tanuri@iprija.ac.id ; asep_maskur@iprija.ac.id ; subhan_alba@ibnuchaldun.ac.id

Informasi artikel	ABSTRAK
<p>Sejarah Artikel : Diterima November 2024 Revisi Desember 2024 Dipublikasikan Januari 2025</p>	<p>Dinasti politik merupakan fenomena yang masih langka dalam sistem politik Indonesia, ini memperlihatkan bahwa kekuasaan politik seringkali menjadi milik keluarga tertentu. Dalam konteks ini, demokrasi Pancasila terus bertransformasi, menghadapi tantangan besar dalam menjaga pluralisme dan keadilan dalam proses politik. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dampak dinasti politik terhadap transformasi demokrasi Pancasila serta mengeksplorasi upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi dominasi kekuasaan keluarga dalam politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis konten untuk memeriksa literatur terkait, data empiris, serta wawancara dengan para ahli politik dan masyarakat sipil yang memiliki pengalaman langsung dengan dinasti politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinasti politik memiliki dampak yang signifikan terhadap demokrasi Pancasila, mereduksi partisipasi politik masyarakat, mengurangi pluralisme, dan menimbulkan ketidakadilan dalam distribusi kekuasaan. Namun, penelitian juga mengungkapkan beberapa inisiatif masyarakat sipil dan reformasi kebijakan yang mungkin dapat mengurangi dominasi dinasti politik dan memperkuat demokrasi Pancasila. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya upaya bersama dari pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga internasional untuk mengatasi masalah dinasti politik dalam sistem politik Indonesia. Perlu adanya reformasi kebijakan yang mendukung partisipasi politik yang inklusif, mengurangi kesenjangan kekayaan dan akses terhadap kekuasaan politik, serta memperkuat mekanisme pengawasan dan akuntabilitas politik untuk memastikan bahwa demokrasi Pancasila tetap berfungsi sesuai dengan prinsip-prinsipnya.</p>
<p>Keywords : Dinasti Politik, Demokrasi Pancasila, Kekuasaan</p>	<p>ABSTRACT <i>Dismantling Political Dynasties: Transformation of Pancasila Democracy in the Context of Family Power.</i> Dynastic politics is still a dominant phenomenon in Indonesia's political system, showing that political power often belongs to certain families. In this context, Pancasila democracy continues to transform, facing major challenges in maintaining pluralism and justice in the political process. This study aims to investigate the impact of political dynasties on the transformation of Pancasila democracy and explore efforts that can be made to overcome the dominance of family power in politics. This research uses a qualitative approach with content analysis techniques to examine related literature, empirical data, as well as interviews with political and civil society experts who have direct experience with political dynasties. The results showed that political dynasties had a significant impact on Pancasila democracy, reducing people's political participation, reducing pluralism, and causing injustice in the distribution of power. However, the research also revealed several civil society initiatives and policy reforms that might reduce the dominance of political dynasties and strengthen Pancasila democracy. The implication of this research is the need for joint efforts from governments, civil society, and international institutions to address the problem of political dynasties in Indonesia's political system. Policy reforms are needed that support inclusive political participation, reduce wealth gaps and access to political power, and strengthen political oversight and accountability mechanisms to ensure that Pancasila democracy continues to function in accordance with its principles.</p>
<p>How to Cite : Tanuri dkk., (2024). Implementasi Strategi Pendidikan Multikultural Berbasis Kearifan Lokal di Sekolah Dasar. <i>Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan</i>, 10(1), pp. 62-76. DOI: http://dx.doi.org/10.24269/jpk.v10.n1.2025.pp62-76</p>	<p>✉ Alamat korespondensi: Hukum Keluarga Islam, Institut Pembina Rohani Islam Jakarta ^{1,2}, Fakultas Ilmu Politik, Universitas Ibnu Chaldun, Jakarta, Indonesia³</p>
<p>✉ E-mail: tanuri@iprija.ac.id</p>	

PENDAHULUAN

Dinasti politik telah menjadi fenomena yang tak terelakkan dalam sistem politik di banyak negara, termasuk Indonesia (Cuevas-Rodríguez dkk., 2023). Di tengah lanskap politik yang terus berubah, dinasti politik tetap menjadi bagian integral dalam pembentukan dan pemeliharaan kekuasaan politik. Konteks Indonesia, dengan tradisi politik yang kuat dan beragam, menunjukkan kehadiran dinasti politik sebagai ciri khas dalam dinamika politiknya (Teney dkk., 2024). Dalam kerangka demokrasi Pancasila, pemahaman yang mendalam tentang dinasti politik menjadi semakin penting, karena dinasti politik tidak hanya memengaruhi struktur politik, tetapi juga nilai-nilai dasar demokrasi. Pada titik ini, pernyataan masalah menjadi penting untuk menyoroti dampak dari keberadaan dinasti politik terhadap kesehatan demokrasi di Indonesia (Fasching & Lelkes, 2023). Fokus pada kekuasaan keluarga dalam dinasti politik membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika politik yang ada. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi transformasi demokrasi Pancasila dalam konteks kekuasaan keluarga yang diwakili oleh fenomena dinasti politik (Weiss, 2023). Melalui penelitian ini, diharapkan akan diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana dinasti politik mempengaruhi sistem politik dan demokrasi di Indonesia (Fachrian & Adriadi, 2023).

Analisis kesenjangan penelitian menunjukkan kurangnya penelitian yang fokus pada hubungan antara dinasti politik dan nilai-nilai demokrasi Pancasila di Indonesia. Karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah ini dengan memberikan wawasan baru tentang dinasti politik dalam konteks kekuasaan keluarga. Keunikan penelitian ini terletak pada fokusnya pada transformasi demokrasi Pancasila, yang memberikan kontribusi baru bagi pemahaman tentang dinasti politik dan demokrasi di Indonesia. Dinasti politik memang menjadi isu yang hangat diperbincangkan di banyak negara, termasuk Indonesia (Samosir dkk., 2023). Fenomena ini terjadi ketika satu keluarga atau kelompok kecil menguasai atau memegang kendali atas posisi-posisi politik penting dalam pemerintahan atau lembaga negara. Dalam konteks Indonesia, fenomena dinasti politik tidaklah baru, namun menjadi semakin mencolok dengan munculnya berbagai

figur politik yang memiliki hubungan keluarga dengan tokoh-tokoh yang sudah ada sebelumnya. Contohnya adalah keluarga Presiden Joko Widodo di mana putra beliau, Gibran Rakabuming Raka, serta menantunya, Bobby Nasution, menjabat dalam posisi strategis di pemerintahan daerah. Di sisi lain, Provinsi Banten juga menjadi sorotan karena kuatnya akar dinasti politik di sana. Mulai dari Chasan Sohib, hingga naiknya Ratu Atut Chosiyah, dan keluarganya yang memegang berbagai posisi eksekutif dan legislatif, menunjukkan bagaimana kekuasaan politik dapat terkonsolidasi dalam satu keluarga atau lingkaran kekuasaan tertentu (Tedla & Mekonen, 2023).

Namun, perlu dicatat bahwa fenomena dinasti politik juga menimbulkan berbagai perdebatan dan kritik. Banyak yang menilai bahwa hal ini dapat merusak demokrasi dan menghambat rotasi kekuasaan yang seharusnya terjadi untuk mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan di tangan satu kelompok atau keluarga (Fiva & Smith, 2018). Maka dari itu, perlu ada upaya untuk memastikan bahwa proses politik tetap terbuka dan adil bagi semua pihak, tanpa adanya dominasi dari satu keluarga atau kelompok kecil. Pertama-tama, penting untuk diakui bahwa kehadiran hubungan keluarga atau kerabat antara kepala daerah atau wakil kepala daerah dengan pejabat lain dapat menimbulkan konflik kepentingan dan merusak integritas serta transparansi dalam pemerintahan (Jalalzai & Rincker, 2018). Hal ini bisa menciptakan kesan nepotisme atau penyalahgunaan wewenang yang dapat mengganggu proses pengambilan keputusan yang adil dan objektif. Selain itu, penyebaran hubungan keluarga atau kerabat pejabat di berbagai provinsi menunjukkan bahwa praktik semacam itu tersebar luas di seluruh negeri. Ini menyoroti pentingnya untuk memperketat aturan dan pengawasan terhadap praktek nepotisme dan konflik kepentingan dalam struktur pemerintahan setiap daerah (Bjarnegård & Zetterberg, 2022). Langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi masalah ini termasuk penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran etika dan regulasi pemerintah, transparansi yang lebih besar dalam proses penunjukan dan promosi pejabat pemerintah, serta pembentukan lembaga independen untuk mengawasi dan menyelidiki dugaan kasus nepotisme dan konflik kepentingan. Dengan demikian, akan tercipta

lingkungan yang lebih transparan, adil, dan akuntabel dalam pemerintahan daerah (Astuti, 2023).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi transformasi demokrasi Pancasila dalam konteks kekuasaan keluarga yang diwakili oleh fenomena dinasti politik. Fenomena dinasti politik merupakan salah satu aspek yang cukup menarik dalam analisis politik di Indonesia, karena memiliki dampak yang signifikan terhadap dinamika politik, demokrasi, dan pembangunan negara secara keseluruhan (Maulida dkk., 2023). Dalam penelitian ini, saya berharap untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana dinasti politik mempengaruhi sistem politik dan demokrasi di Indonesia. Dengan memahami mekanisme dan dampak dinasti politik, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih kritis dan holistik terhadap tantangan dan peluang dalam memperkuat sistem politik dan demokrasi di Indonesia (Santika dkk., 2023). Melalui analisis yang mendalam dan metodologi penelitian yang kuat, saya berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pemahaman kita tentang dinamika politik Indonesia, serta memberikan saran kebijakan yang relevan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi politik yang lebih inklusif dalam konteks dinasti politik (Hudjolly & Dewi, 2023).

Berdasarkan penelitian terdahulu peneliti menganalisis relevansi pembahasan yang serupa dengan judul penelitian ini DINASTI POLITIK: Transformasi Demokrasi Pancasila dalam Konteks Kekuasaan Keluarga. Kajian tentang penelitian terdahulu perlu kami cantumkan sebagai dasar pemikiran sekaligus bahan refleksi serta elaborasi agar menghasilkan pembahasan yang lebih komprehensif.

Pertama artikel berjudul Dinasti Politik: Ancaman atau Kontribusi bagi Demokrasi, Penelitian ini menyelidiki peran dinasti politik dalam demokrasi dan menggali dampaknya terhadap stabilitas dan kualitas proses demokratisasi. Dari penelitian ini, ditemukan bahwa dinasti politik dapat mengancam demokrasi dengan memperkuat oligarki dan menghambat partisipasi politik, namun juga dapat memberikan kontribusi positif dengan menawarkan stabilitas politik yang berkelanjutan (Raihan Naufal, Muhammad Ramadhan, and Muhibban 2024).

Kedua artikel berjudul Politik Dinasti di Indonesia: Tinjauan Kritis Terhadap Penerapan

Demokrasi Di Era Kepemimpinan Presiden Jokowi. Tulisan ini mengungkapkan politik dinasti dan penerapan demokrasi di era Kepemimpinan Presiden Jokowi yang pada kenyataannya di rezim Jokowi telah terjadi pelanggaran etika berdemokrasi di Indonesia (Syaur, A. Shantih, and Afrilia 2023).

Artikel ketiga berjudul Politik Dinasti dalam Pemilihan Kepala Daerah: Persimpangan Antara Hak Asasi dan Demokrasi. Dalam penelitian ini ditemukan praktik politik dinasti di Indonesia telah berlangsung sejak zaman pra reformasi. Sebelumnya politik dinasti cenderung terjadi di pemerintahan pusat, namun kini praktik politik dinasti lazim ditemukan pada pemerintahan daerah. Banyaknya praktik politik dinasti di beberapa daerah dikhawatirkan dapat menciderai prinsip demokrasi yang bisa menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan dan praktik korupsi dan berdampak pada menurunnya tata kelola pemerintahan di daerah.

Artikel keempat berjudul Analisis Dinasti Politik di Indonesia: Dilema Etika Demokrasi dan Relevansinya dalam Keadilan Politik Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena politik dinasti di Indonesia yang menjadi sebuah tantangan dalam etika berpolitik karena bertentangan dengan prinsip demokrasi yang mengutamakan kedaulatan rakyat. Praktik ini dapat menghambat partisipasi politik masyarakat luas dan menciptakan oligarki politik. Fenomena politik dinasti yang kental dengan unsur kekerabatan ini berimplikasi pada dinamika partai politik dalam tatanan pemerintahan Indonesia (Sucipto, Sitinjak, and Sujatmoko 2023).

Artikel kelima berjudul Kajian Tentang Dinasti Politik: Realitas dan Dampaknya di Indonesia dari Perspektif Etika Politik. Penelitian ini membahas fenomena dinasti politik di Indonesia dari perspektif etika politik, dengan tujuan untuk mengungkap realitas, dampak, serta solusi yang relevan terhadap masalah ini.

Dari beberapa penelitian di atas maka menganalisa bahwa kesenjangan utama terletak pada kurangnya pemahaman mendalam tentang bagaimana dinasti politik mempengaruhi praktik demokrasi, keadilan, dan kebebasan di Indonesia. Penting untuk menyoroti bahwa dinasti politik seringkali memiliki pengaruh yang signifikan dalam politik Indonesia, tetapi dampaknya terhadap nilai-nilai demokrasi Pancasila mungkin belum sepenuhnya dipahami atau dieksplorasi. Oleh karena itu, kesenjangan

ini menunjukkan perlunya penelitian yang lebih terperinci untuk mengisi celah pengetahuan ini (Suwignyo & Yuliantri, 2023). Penelitian yang lebih mendalam dapat memberikan wawasan baru tentang dinasti politik dalam konteks kekuasaan keluarga, termasuk bagaimana dinasti politik mempengaruhi proses pembuatan kebijakan, distribusi kekuasaan, dan partisipasi politik masyarakat umum (Endang Sutrisno, 2023). Hal ini akan membantu memperkaya pemahaman tentang dinamika politik di Indonesia dan dampaknya terhadap praktik demokrasi Pancasila (Ananda, 2023).

Novelty dalam penelitian ini terletak pada pendekatan interdisipliner yang menggabungkan studi politik, sosiologi, sejarah, dan antropologi dalam menganalisis dinasti politik dalam konteks demokrasi Pancasila. Beberapa justifikasi penelitian yang dapat disertakan sebagai penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, penelitian ini akan memberikan kontribusi baru terhadap pemahaman tentang dinasti politik dalam konteks demokrasi Pancasila. Dengan menganalisis dinasti politik dari berbagai perspektif ilmu sosial, penelitian ini dapat memperkaya teori-teori yang ada dan menghasilkan pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika kekuasaan keluarga dalam politik. Kedua, hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pembuat kebijakan dan praktisi politik dalam mengatasi tantangan yang terkait dengan dinasti politik. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana dinasti politik memengaruhi demokrasi Pancasila, langkah-langkah konkret dapat diambil untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam sistem politik. Dan ketiga, melalui pendekatan interdisipliner, penelitian ini juga dapat menantang paradigma yang ada tentang dinasti politik dan demokrasi. Dengan mempertanyakan asumsi-asumsi yang mendasari pemahaman konvensional tentang dinasti politik, penelitian ini dapat membuka ruang untuk pemikiran kritis baru dan perspektif yang lebih inklusif. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan yang signifikan bagi pemahaman tentang dinasti politik dalam konteks demokrasi Pancasila dan dapat memberikan arahan bagi pembuat kebijakan dan praktisi politik di tingkat nasional dan internasional (Frindiyani dkk., 2023).

METODE

Dalam penelitian ini, metodologi yang digunakan melibatkan pendekatan kualitatif yang komprehensif. Pertama-tama, pendekatan ini menggali data melalui wawancara mendalam dengan informan kunci yang memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung tentang dinasti politik dan kekuasaan keluarga dalam konteks demokrasi Pancasila. Wawancara ini dilakukan dengan cermat untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang dinamika internal dan eksternal yang memengaruhi fenomena yang diteliti. Selain wawancara, penelitian ini juga memanfaatkan observasi partisipan yang intensif, terutama dalam konteks acara politik lokal dan nasional yang melibatkan anggota dinasti politik. Observasi ini membantu dalam memperoleh wawasan langsung tentang perilaku politik dan interaksi antara anggota dinasti politik, serta pola-pola kekuasaan keluarga yang mungkin terjadi (Maulida dkk., 2023).

Selanjutnya, analisis dokumen juga merupakan bagian integral dari metodologi ini. Dokumen-dokumen yang dianalisis mencakup catatan resmi, artikel ilmiah, dan berbagai dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan politik dan bisnis keluarga yang terkait dengan dinasti politik yang diteliti. Analisis dokumen ini memberikan konteks historis dan institusional yang penting untuk pemahaman yang lebih baik tentang evolusi dinasti politik dalam konteks demokrasi Pancasila. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis secara tematis, dengan mengidentifikasi pola-pola utama, konflik, dan dinamika kekuasaan yang mendasari fenomena dinasti politik dalam konteks demokrasi Pancasila. Pendekatan triangulasi digunakan untuk memvalidasi temuan dan memastikan keabsahan interpretasi yang diperoleh dari berbagai sumber data. Selain itu, pendekatan teoritis juga digunakan untuk memperkuat analisis. Berbagai konsep dan teori tentang demokrasi, kekuasaan politik, dan dinasti politik diterapkan untuk memahami fenomena yang diamati dan menarik hubungan antara dinasti politik dan transformasi demokrasi Pancasila. Pendekatan interdisipliner juga diadopsi untuk mengintegrasikan perspektif dari berbagai disiplin ilmu, termasuk ilmu politik, sosiologi, dan studi keluarga (Ngesthi dkk., 2023). Dengan menggunakan pendekatan yang komprehensif ini, penelitian ini bertujuan untuk membongkar struktur dan mekanisme dinasti politik dalam konteks demokrasi Pancasila, serta

mengidentifikasi dampaknya terhadap konsolidasi demokrasi dan tatanan politik Indonesia secara keseluruhan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam konteks politik Indonesia, fenomena dinasti politik menjadi perhatian utama, terutama dalam upaya memahami dinamika demokrasi Pancasila. Dinasti politik mencerminkan fenomena di mana kekuasaan politik terkonsentrasi dalam satu keluarga atau jaringan keluarga yang menguasai berbagai posisi penting dalam pemerintahan, baik di tingkat nasional maupun lokal. Dalam konteks ini, demokrasi Pancasila, yang diperjuangkan untuk memastikan keadilan, partisipasi, dan kedaulatan rakyat, menghadapi tantangan serius karena cenderung terdistorsi oleh dominasi kekuasaan keluarga (Asif dkk., 2020). Penelitian mengenai dinasti politik telah mengungkapkan beberapa temuan utama yang menggambarkan dinamika transformasi demokrasi Pancasila dalam konteks kekuasaan keluarga. Pertama, dinasti politik cenderung menghambat rotasi kekuasaan yang sehat dan mereduksi pluralisme politik dengan memonopoli akses terhadap sumber daya politik dan ekonomi. Kedua, praktik nepotisme dan klienelisme seringkali menjadi ciri khas dari sistem politik yang didominasi oleh dinasti, di mana anggota keluarga atau kerabat dekat diberikan posisi dan keuntungan politik tanpa mempertimbangkan kualifikasi atau kompetensi mereka (Meliala & Permana, 2023).

Dalam teori politik, fenomena dinasti politik dapat diinterpretasikan melalui berbagai kerangka pemikiran, termasuk teori oligarki, yang menyoroti konsentrasi kekuasaan dalam tangan sedikit individu atau kelompok, serta teori patron-klien, yang menyoroti hubungan simbiosis antara penguasa dan mereka yang bergantung pada mereka untuk keuntungan politik atau ekonomi (Fabre, 2023). Dinasti politik juga dapat dilihat sebagai contoh nyata dari konsep hegemoni, di mana satu kelompok atau entitas mempertahankan dominasi atas yang lain melalui kendali atas institusi politik dan ekonomi (Harting, 2023). Dengan memahami dinasti politik dalam konteks teori yang relevan, kita dapat lebih baik menafsirkan dampaknya terhadap demokrasi Pancasila. Perlu langkah-langkah nyata untuk mengatasi dominasi dinasti politik, termasuk reformasi kelembagaan dan pemberlakuan aturan yang membatasi kekuasaan politik yang terkonsentrasi dalam satu

keluarga atau jaringan keluarga, yang mana ini hanya ada pada sistem monarki. Hanya dengan menghadapi tantangan ini, demokrasi Pancasila dapat mencapai potensinya sebagai sistem yang mewakili keadilan, partisipasi, dan kedaulatan rakyat secara menyeluruh (Bonotti & Weinstock, 2021).

Salah satu argumen utama yang bisa kami kemukakan adalah bahwa sistem monarki cenderung tidak sejalan dengan semangat modernitas dan demokrasi yang ingin diadopsi oleh bangsa Indonesia yang baru merdeka. Monarki sering kali dianggap sebagai bentuk pemerintahan yang kuno dan tidak sesuai dengan aspirasi masa depan sebuah negara yang ingin menjadi bagian dari masyarakat global yang demokratis (Silitonga dkk., 2023). Sistem monarki sering kali memperkuat kekuasaan yang diwariskan turun-temurun, yang dapat menyebabkan konsolidasi kekuasaan pada keluarga kerajaan tertentu dan mengurangi kesempatan bagi individu-individu dari lapisan masyarakat yang lebih luas untuk berpartisipasi dalam proses politik. Ini bertentangan dengan semangat inklusivitas dan kesetaraan yang ingin dipromosikan oleh Indonesia merdeka (Lewis, 2023). Sebagai lanjutan dari poin sebelumnya, sistem monarki dapat membuka pintu bagi kemungkinan terbentuknya dinasti-dinasti yang memegang kendali atas negara. Hal ini dapat menimbulkan masalah dalam hal akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan, karena kekuasaan lebih cenderung terkonsentrasi di tangan keluarga kerajaan tersebut (Sekarintias dkk., 2023).

Pentingnya memahami konteks budaya dan historis dalam perjalanan bangsa ini agar prinsip-prinsip keadilan dan meritokrasi tetap terjaga dengan baik. Meskipun ada tradisi monarki di beberapa bagian kepulauan, namun banyak wilayah di Indonesia tidak memiliki tradisi monarki yang kuat. Oleh karena itu, mungkin sulit bagi sistem monarki untuk diterapkan secara konsisten di seluruh negara. Poin penting yang bisa saya sampaikan adalah bahwa mayoritas suara peserta sidang kemerdekaan menolak kekuasaan politik yang diwariskan turun-temurun berdasarkan hubungan kekerabatan atau monarki. Ini mencerminkan keinginan rakyat yang ingin memiliki kontrol yang lebih besar atas nasib politik mereka dan menegaskan komitmen mereka terhadap nilai-nilai demokrasi dan kebebasan (Marbun dkk., 2022). Dengan demikian, argumen tersebut secara kolektif

dapat digunakan untuk mendukung penolakan terhadap sistem monarki dalam konteks Indonesia merdeka dan memperkuat argumen untuk memilih republik sebagai bentuk negara yang lebih sesuai dengan aspirasi dan nilai-nilai masyarakat (Soemantri dkk., 2022).

Dinasti Politik di Indonesia

Dinasti politik di Indonesia merupakan fenomena yang terus terjadi, dengan semakin banyaknya keluarga yang memegang kendali atau pengaruh signifikan dalam politik Indonesia dari generasi ke generasi. Praktek dinasti politik telah disahkan oleh Mahkamah Konstitusi dan dianggap konstitusional karena tidak bertentangan dengan Konstitusi Indonesia dan UU Hak Asasi Manusia (Lado, 2022). Kehadiran dinasti politik menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap demokrasi dan pemerintahan, karena dapat mengancam keberlanjutan pemerintahan dan melemahkan prinsip-prinsip demokrasi. Proporsi anggota parlemen Indonesia dari dinasti cukup besar, dengan satu dari setiap empat anggota parlemen adalah dinasti. Proporsi ini juga meningkat di kalangan anggota parlemen perempuan selama bertahun-tahun. Menjamurnya dinasti politik dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti afiliasi partai, proses pencalonan, dan struktur internal partai (Rusnaedy dkk., 2021). Penyelenggaraan pilkada juga menyebabkan munculnya calon tunggal yang semakin mempersulit proses demokrasi di tingkat lokal.

Dinasti politik mempunyai kehadiran yang signifikan di berbagai negara, termasuk Brasil, Indonesia, dan lainnya. Di Indonesia, hampir separuh kandidat perempuan yang terpilih menjadi anggota parlemen nasional pada tahun 2019 adalah anggota dinasti politik. Praktik politik dinasti juga terlihat di tingkat lokal, seperti di Desa Cileunyi Wetan Kabupaten Bandung, dimana keluarga kepala desa telah mempertahankan kekuasaan selama beberapa periode (Prabowo & Hartati, 2019). Dampak dinasti politik terhadap kinerja pemerintah daerah di Indonesia memang negatif, namun tata kelola publik yang baik dapat memitigasi dampak ini. Secara keseluruhan, temuan-temuan ini menunjukkan bahwa dinasti politik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembuatan kebijakan dan proses politik, sehingga menyoroti perlunya regulasi dan peningkatan tata pemerintahan yang baik untuk mengurangi dampak buruknya.

Pertama, kasus dinasti keluarga Kusnadi di Kabupaten Bangkalan. Dinasti-dinasti ini melibatkan keluarga yang sama yang memegang kekuasaan dalam jangka waktu yang lama, dengan anggota keluarga menduduki posisi kepala daerah atau anggota legislatif. Kehadiran dinasti politik dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti peran partai politik, lemahnya regulasi, serta buruknya proses rekrutmen dan seleksi calon internal (Rusnaedy dkk., 2021). Dinasti-dinasti ini seringkali membangun jaringan kekuasaan yang solid dan dapat mendominasi serta membatasi demokrasi di dalam partai politik (Setiawan & Sa'diyah, 2021). Meski menghadapi kasus korupsi dan kontroversi, dinasti-dinasti ini tetap dapat mempertahankan jaringan dan pengaruh politiknya, seperti yang terlihat pada kasus Dinasti Atut di Banten. Kehadiran dinasti politik dan pemusatan kekuasaan dalam satu keluarga dapat menghambat sirkulasi kepemimpinan dan berpotensi mengancam transisi dan konsolidasi demokrasi.

Kedua, Keluarga tertentu di Jawa Tengah. Keluarga-keluarga tertentu di Jawa Tengah, seperti di Kabupaten Kendal dan Demak, mempunyai dominasi politik yang kuat dalam memenangkan pemilukada. Kehadiran dinasti politik dalam perebutan kekuasaan di tingkat daerah dipengaruhi oleh peran partai politik dan peraturan mengenai pemilihan kepala daerah (Ananda, 2023). Kecenderungan partai politik untuk mengusung calon berdasarkan keinginan elite partai, bukan melalui mekanisme demokrasi yang mempertimbangkan kemampuan dan integritas calon, turut mendorong tumbuhnya dinasti politik (Agung, 2022). Lemahnya regulasi untuk memangkas dinasti politik juga berkontribusi terhadap meluasnya kehadiran mereka dalam pemilihan kepala daerah. Praktik politik dinasti ini ditengarai melemahkan check and balance sehingga berujung pada tindakan korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah dan kerabatnya.

Dinasti politik di Banyumas telah dipengaruhi oleh berbagai perubahan sosial di daerah. Perubahan ini telah menyebabkan pergeseran nilai-nilai dalam keluarga, termasuk nilai yang ditempatkan pada anak-anak (Mutahir dkk., 2023). Orang tua di Banyumas terutama memandang anak-anak mereka sebagai aset ekonomi dan berinvestasi dalam pendidikan mereka untuk peningkatan kualitas. Tidak ada perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan, yang mencerminkan sikap egaliter budaya

Banyumas. Perkembangan dinasti politik di tingkat lokal dapat dilihat sebagai bentuk "Cendanasasi," di mana keluarga elit lokal menempatkan kerabat mereka pada posisi kekuasaan yang strategis untuk mempertahankan kontrol (Amiruddin Dardiri dkk., 2023). Pola politik dinasti ini merupakan konsekuensi negatif dari otonomi daerah, pembajakan demokrasi dan melanggengkan kekuasaan keluarga. Oleh karena itu, keteladanan kepala daerah yang terlibat dalam politik dinasti di Jawa Tengah merupakan cerminan tantangan yang dihadapi demokrasi di tanah air.

Ketiga, Dinasti Politik di Banten. Politik dinasti di Banten merupakan fenomena dimana kekuasaan politik diwariskan dalam sebuah keluarga secara turun-temurun. Hal tersebut terlihat dalam lanskap politik Banten, terbukti dengan hadirnya dinasti politik di wilayah tersebut. Dinasti-dinasti ini mempunyai hasil yang berbeda-beda dalam pemilihan kepala daerah, ada yang mempertahankan dominasinya, ada pula yang mengalami kekalahan (Maftuh, 2022). Faktor-faktor seperti teori pengendalian batas, yang berfokus pada bagaimana elit politik mempertahankan kekuasaannya, telah digunakan untuk menganalisis keberhasilan dan kegagalan dinasti-dinasti tersebut. Selain itu, adopsi ajaran Islam yang dilakukan oleh para penguasa Banten, termasuk perubahan nama mereka menjadi nama Arab, juga telah dijajaki kaitannya dengan kelanggengan kekuasaan mereka. Hubungan perdagangan antara Banten dan Portugal, khususnya pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin, juga telah dipelajari, menyoroti orientasi pragmatis-strategis kebijakan komersial Banten (Ali, 2022). Perdagangan rempah-rempah, yang berperan penting dalam kemakmuran Banten, mempengaruhi lanskap politik dan ekonomi wilayah tersebut. Secara keseluruhan, politik dinasti di Banten dibentuk oleh berbagai faktor, antara lain strategi politik, pengaruh agama, dan pertimbangan ekonomi.

Keempat, Dinasti Politik di Sumatera Utara. Politik dinasti yang ditandai dengan turunnya kekuasaan dalam sebuah keluarga banyak terjadi di berbagai daerah, termasuk di Desa Mangaledang Lama di Kabupaten Padang Lawas Utara (Ananda, 2023). Praktik ini menghambat mobilitas masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan dapat berujung pada korupsi serta menguatnya otoritas politik dan kepentingan

anggota keluarga (Agung, 2022). Kehadiran dinasti politik menjadi tantangan bagi demokrasi, karena membatasi pluralisme aktor dan menyulitkan realisasi substansi demokrasi itu sendiri. Tumbuh kembangnya dinasti politik dipengaruhi oleh partai politik dan peraturan mengenai pilkada, dimana mekanisme pencalonannya tidak berjalan sebagaimana mestinya (Sembiring dkk., 2023).

Kelima, dinasti politik di Sulawesi Selatan. Dinasti politik di Sulawesi Selatan telah menjadi ciri yang menonjol dalam lanskap politik di wilayah ini. Sifat patriarki dalam sistem dinasti politik di Sulawesi Selatan telah merugikan politisi perempuan, seperti yang terlihat pada kasus Tenri (Dewi, 2018). Namun, beberapa kandidat perempuan yang tidak memiliki dukungan kekerabatan politik berhasil mendapatkan kursi di parlemen dengan memanfaatkan koneksi sosial dan keagamaan mereka dengan masyarakat (Ilmi dkk., 2021). Masyarakat adat Kajang di Sulawesi Selatan mempunyai sistem politik yang unik, dimana pemimpinya dipilih secara demokratis dan bukan berdasarkan darah atau ikatan keturunan. Kemunculan dan kelangsungan dinasti politik di Sulawesi Tenggara difasilitasi oleh berbagai faktor, antara lain loyalitas pendukung, manipulasi kebijakan publik, dan proses asimilasi dengan politisi daerah lain. Tumbuhnya dinasti politik di Sulawesi Selatan dipengaruhi oleh peran partai politik dan lemahnya mekanisme demokrasi dalam proses pencalonan calon (Nurdin dkk., 2017).

Dampak Dinasti Politik Era Joko Widodo

Saya akan menyoroti fenomena politik dinasti yang terkait dengan Joko Widodo, Presiden Indonesia saat ini. Politik dinasti merujuk pada praktik di mana kekuasaan politik atau pengaruh politik dipertahankan dalam satu keluarga atau oleh orang-orang yang terkait secara keluarga.

Dalam konteks Joko Widodo, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan:

Pertama, Keluarga dan Lingkaran Terdekat. Salah satu aspek politik dinasti adalah dominasi keluarga atau lingkaran terdekat dalam posisi kekuasaan atau pengaruh politik. Menempatkan putra Joko Widodo pada posisi kekuasaan seperti wali kota, ketua partai, dan wakil presiden dinilai bertentangan dengan prinsip meritokrasi dan keadilan politik. Meritokrasi adalah gagasan bahwa posisi harus diberikan berdasarkan prestasi, bukan hubungan

keluarga atau hubungan pribadi. Dengan diangkatnya putranya pada posisi tersebut, menimbulkan pertanyaan apakah ia dipilih berdasarkan kualifikasi dan kemampuannya, atau hanya karena ikatan keluarga. Hal ini melemahkan prinsip-prinsip meritokrasi dan dapat dilihat sebagai favoritisme atau nepotisme. Selain itu, keadilan politik mencakup jaminan keadilan dan kesempatan yang sama bagi semua individu dalam sistem politik. Dengan memberikan putranya berbagai posisi kekuasaan, hal ini dapat membatasi peluang bagi individu lain yang memenuhi syarat untuk memegang posisi tersebut dan berpartisipasi dalam proses politik (Fealy, 2020).

Kedua, pengaruh Politik Melalui Koneksi Keluarga Politik dinasti, yang ditandai dengan peralihan kekuasaan politik dalam keluarga, merupakan fenomena yang diamati baik dalam masyarakat pramodern maupun modern. Meskipun Joko Widodo tidak terlibat langsung dalam pembentukan dinasti politik, terdapat kritik dan spekulasi mengenai pengaruh anggota keluarganya dalam proses pengambilan keputusan politik. Dinasti politik dipandang sebagai sistem reproduksi kekuasaan primitif yang bertumpu pada garis keturunan dan garis keturunan, serta cenderung menghambat terwujudnya demokrasi. Namun, penting untuk dicatat bahwa ikatan dinasti masih dapat memberikan keuntungan bagi karir politisi, terutama dalam mencapai posisi puncak kekuasaan di eksekutif. Perilaku politisi turun temurun dipengaruhi oleh demokratisasi dan modernisasi politik, yang dapat mengubah jaringan partikularistik menjadi bentuk dinastisisme yang lebih progresif dan terprogram (Ananda, 2023).

Ketiga, pengaruh terhadap pembangunan politik. Praktik politik dinasti di Indonesia berpotensi menghambat transparansi, akuntabilitas, dan demokratisasi dalam sistem politik. Penelitian menunjukkan bahwa satu dari setiap empat anggota parlemen di Indonesia adalah dinasti, dan proporsi anggota parlemen perempuan telah meningkat selama bertahun-tahun (Sukti dkk., 2022). Bertahannya dinasti politik dapat dilihat sebagai proses pemulihan rezim dinasti, dimana elit-elit pengawal lama berusaha merebut kembali kekuasaan dan melindungi kekayaan mereka (Tyson & Nawawi, 2022). Hal ini dapat menimbulkan distorsi politik dan menghambat pengembangan sistem politik yang transparan dan akuntabel. Selain itu, penerapan Negara Perkembangan

Baru dalam politik Indonesia dicirikan sebagai pendekatan pragmatis dan hibrid yang dapat berkontribusi terhadap peningkatan otoritarianisme dan kerentanan demokrasi pedesaan (Pelzl & Poelhekke, 2023). Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa politik dinasti dapat berdampak negatif terhadap dinamika politik dan pembangunan Indonesia, sehingga berpotensi menghambat transparansi, akuntabilitas, dan demokratisasi dalam sistem politik negara.

Penulis merangkum dampak-dampak negatif dari praktik politik dinasti ala Jokowi dengan mengacu pada data empiris dan literatur yang relevan. Berikut adalah beberapa poin yang penulis paparkan:

Pertama, pemusatan kekuasaan. Praktik politik dinasti memang dapat mengarah pada sentralisasi kekuasaan di dalam keluarga atau lingkaran dekat, sehingga dapat menghambat pertumbuhan demokrasi yang sehat. Pemusatan kekuasaan ini seringkali mengakibatkan kurangnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengambilan keputusan pemerintah (Asako dkk., 2012). Politisi dinasti, yang mewarisi keunggulan politik, cenderung memberikan lebih banyak distribusi ke daerah pemilihannya dan menikmati keberhasilan pemilu yang lebih tinggi. Namun kehadiran mereka dapat merugikan kinerja perekonomian daerah, meskipun manfaat distributif yang dihasilkannya lebih besar (Armand dkk., 2020). Hal ini menunjukkan bahwa politisi dinasti mungkin memprioritaskan kepentingan mereka sendiri di atas kesejahteraan daerah secara keseluruhan. Selain itu, kurangnya kohesivitas di antara elit otokratis dapat menghalangi mereka untuk secara efektif mengawasi para diktator, sehingga memungkinkan beberapa diktator untuk memerintah secara tirani tanpa pembalasan (Kaire, 2022). Temuan-temuan ini menyoroti potensi dampak negatif praktik politik dinasti terhadap demokrasi dan pemerintahan. Dinasti politik juga sering kali mengakibatkan konsentrasi kekayaan dan kekuasaan pada kelompok tertentu, seperti keluarga atau kroni politik. Hal ini dapat memperdalam kesenjangan ekonomi dan sosial, karena sumber daya dan peluang lebih banyak terkonsentrasi pada sedikit orang.

Kedua, korupsi dan nepotisme Dinasti politik, baik dalam masyarakat demokrasi transisi atau maju, rentan terhadap korupsi dan nepotisme. Penempatan anggota keluarga atau orang terdekat pada posisi kekuasaan dapat

mengakibatkan eksploitasi posisi mereka untuk keuntungan pribadi atau kelompok, seringkali dengan mengorbankan kepentingan umum (Oliveira & Souza, 2022). Praktek dinasti politik telah dikaitkan dengan isu-isu seperti tuntutan satu pihak yang berlebihan, nilai-nilai feodalisme, praktik patrimonial, patronase, dan pemblokiran individu yang kompeten untuk berpartisipasi dalam posisi politik. Praktik-praktik ini dapat menghambat keberlangsungan pemerintahan, merusak substansi demokrasi, dan berujung pada tumbuh suburnya praktik-praktik korup dan kolusi. Modernisasi politik dan transformasi jaringan partikularistik menjadi bentuk dinasti politik yang lebih progresif dan terprogram dipandang sebagai solusi potensial untuk mengurangi dampak negatif dinasti politik. Ketika kekuasaan terkonsentrasi pada kelompok tertentu, terjadi risiko penurunan inovasi dan kualitas kebijakan. Keharusan untuk mempertahankan kekuasaan dan memenuhi kepentingan internal dapat menghambat proses pengambilan keputusan yang objektif dan berbasis bukti (Darmansyah & Syahrani, 2020).

Ketiga, polarisasi politik. Politik dinasti memang dapat memperbesar polarisasi politik dengan menciptakan perpecahan antara kelompok yang didukung dinasti dan kelompok yang tidak didukung dinasti tersebut (Mantzaris & Domenikos, 2023). Perpecahan ini dapat menghambat dialog konstruktif dan kerja sama lintas partai, karena menciptakan mentalitas “kita versus mereka” (Vasist dkk., 2023). Hal ini dapat menghambat proses demokratisasi dengan menghambat terbentuknya sistem politik yang inklusif dan representatif (Kubin & von Sikorski, 2021). Selain itu, politisi dinasti mungkin memprioritaskan kepentingan mereka sendiri dan kepentingan pendukungnya di atas kebutuhan masyarakat yang lebih luas (Andreadis & Stavrakakis, 2019). Hal ini dapat mengarah pada kebijakan yang menguntungkan segelintir orang, namun mengabaikan kebutuhan mayoritas (Asako dkk., 2012). Secara keseluruhan, politik dinasti dapat memperburuk polarisasi politik dan menghambat perkembangan sistem demokrasi yang sehat dan inklusif.

Keempat, kesenjangan ekonomi dan social. Dinasti politik dapat menimbulkan dampak negatif, termasuk pemusatan kekayaan dan kekuasaan pada kelompok tertentu, sehingga menimbulkan kesenjangan ekonomi dan sosial. Konsentrasi sumber daya dan peluang pada lebih sedikit orang dapat memperdalam kesenjangan

yang ada (Dulay, 2021). Dinasti politik berbeda dalam asal usul ideologinya, dengan dinasti pro-demokrasi menunjukkan dukungan yang lebih kuat terhadap demokrasi (Fiva & Smith, 2018). Berlangsungnya dinasti politik dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti keunggulan petahana dan jaringan internal organisasi partai (Permana, 2023). Dalam beberapa kasus, lemahnya kendala dalam proses seleksi politik dapat mengakibatkan terpilihnya politisi dinasti dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami pembentukan dan implikasi dinasti politik, termasuk dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, kebijakan distributif, dan representasi gender. Ketika kekuasaan terkonsentrasi pada kelompok tertentu, terjadi risiko penurunan inovasi dan kualitas kebijakan. Keharusan untuk mempertahankan kekuasaan dan memenuhi kepentingan internal dapat menghambat proses pengambilan keputusan yang objektif dan berbasis bukti.

Kelima, penurunan legitimisasi pemerintah. Pada pemilu yang politik dinasti sangat dominan dan tanpa mempertimbangkan kualifikasi atau integritas calon, memang dapat berujung pada merosotnya legitimasi pemerintahan di mata masyarakat. Hal ini dapat melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik dan demokrasi secara keseluruhan (Asako dkk., 2012). Kehadiran politisi dinasti yang mewarisi keunggulan politik dapat berdampak negatif terhadap hasil pemilu dan pilihan kebijakan (Fumarola, 2020). Meskipun membawa lebih banyak distribusi ke daerah mereka, legislator dinasti merugikan kinerja perekonomian daerah tersebut (James dkk., 2019). Selain itu, kualitas pemilu, termasuk persepsi integritas pemilu, dapat mempengaruhi perilaku dan sikap pemilih tentang akuntabilitas (Daron Acemoglu, 2009). Karakteristik individu seperti keberpihakan dan faktor kontekstual seperti kejelasan tanggung jawab pemerintah dan pluralisme media dapat memoderasi hubungan antara persepsi integritas pemilu dan pemilihan petahana. Poin-poin tersebut dapat dijelaskan secara lebih rinci dengan merujuk pada studi empiris, analisis kebijakan, dan contoh konkret dari dampak politik dinasti ala Jokowi atau dinasti politik lainnya di berbagai konteks. Uraian ini akan mencerminkan kerangka penelitian yang cermat dan menyediakan kontribusi penting terhadap pemahaman tentang politik dinasti dan konsekuensinya dalam konteks global.

Temuan penelitian ini berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap masyarakat. Sisi positifnya, penelitian menyoroti pentingnya meningkatkan keterlibatan masyarakat dan partisipasi politik. Intervensi ini dapat menghasilkan masyarakat yang lebih terinformasi dan inklusif, mendorong transparansi, akuntabilitas, dan realisasi hak. Namun, ada juga potensi dampak negatifnya. Studi mengenai pencapaian pendidikan dan partisipasi politik di Jerman (Shi dkk., 2023) menunjukkan bahwa kekurangan dan kelebihan keluarga dapat diperkuat atau diimbangi melalui pendidikan, yang dapat melanggengkan ketimpangan dalam suara politik. Selain itu, studi mengenai dampak upaya antikorupsi tingkat tinggi di Argentina dan Kosta Rika (Paricio-Esteban dkk., 2023) menunjukkan bahwa upaya tersebut dapat menurunkan kepercayaan terhadap institusi dan mengurangi keterlibatan politik. Hal ini dapat melemahkan legitimasi pemerintah dan menurunkan partisipasi masyarakat.

Paparan dinasti politik dapat menimbulkan konflik politik dan ketegangan sosial baik di tingkat lokal maupun nasional. Persaingan antar suku dalam suatu dinasti dapat memperkuat polarisasi politik dan menciptakan ketegangan antar pendukung keluarga politik yang berbeda, sehingga dapat merugikan stabilitas politik dan keamanan masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan ini, penting untuk menyajikan pendekatan yang seimbang dalam mendiskusikan temuan. Hal ini termasuk menyoroti dampak negatif dinasti politik sekaligus menekankan upaya dan solusi perbaikan sistem politik, seperti mendorong reformasi politik, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan memperkuat mekanisme kontrol dan pengawasan kekuasaan politik (Wang dkk., 2023).

SIMPULAN

Dinasti politik telah menjadi tantangan besar bagi proses demokratisasi di Indonesia, menciptakan kesenjangan dalam akses politik dan menghambat perputaran kekuasaan dan munculnya pemimpin yang kompeten (Agustino dkk., 2023). Konsentrasi kekuasaan politik dalam keluarga tertentu membatasi kesempatan orang lain untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi (Putri dkk., 2023). Fenomena ini telah merugikan perkembangan demokrasi yang sehat dan inklusif di negara ini (Anisa Agustin dkk., 2022). Selain itu, transformasi demokrasi

Pancasila di Indonesia juga dipengaruhi oleh hubungan antara Islam dan agama sipil bangsa (Liddle dkk., 2022). Sejauh mana Pancasila dijunjung tinggi sebagai agama sipil nasional selama transisi politik sangat penting bagi ketahanan demokratisasi di Indonesia (Holidin, 2022). Peran konstruktif organisasi masyarakat sipil juga penting dalam mendukung demokratisasi yang tangguh dan melawan gejolak politik. Transformasi nilai-nilai demokrasi Pancasila terlihat pada upaya masyarakat menentang dinasti politik dan menciptakan sistem politik yang lebih inklusif dan representatif. Gerakan anti dinasti mendapat dukungan luas dari masyarakat (Kristianita & Najicha, 2022) (Nugraheni dkk., 2023). Gerakan ini bertujuan untuk mematahkan hegemoni dinasti politik dan mendorong lanskap politik yang lebih demokratis dan adil di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, R. (2022). Effect of Dynamic Politics on The Sustainability of Local Democracy Legal Politics. *APLIKATIF: Journal of Research Trends in Social Sciences and Humanities*, 1(2), 148–154. <https://doi.org/10.59110/aplikatif.v1i2.114>
- Agustino, L., Hikmawan, M. D., & Silas, J. (2023). Keberlanjutan Demokrasi Indonesia? Dua Tahun Pandemi COVID-19 yang Penuh Tantangan. *Ijd-Demos*, 5(2), 212–232. <https://doi.org/10.37950/ijd.v5i2.444>
- Ali, M. (2022). Kebijakan Politik Pragmatis Strategis Maulana Hasanuddin Banten (1546-1570) terhadap Portugis. *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, 7(1), 26–37. <https://doi.org/10.14710/jscl.v7i1.39859>
- Amiruddin Dardiri, M., Waluyo, W., & Aquil, A. (2023). Kondisi Sosial-Politik Dinasti Bani Abbasiyah Dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Islam. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 24(1), 69–82. <https://doi.org/10.36769/asy.v24i1.318>
- Ananda, A. I. (2023). The Influence of Political Dynasty on the Democracy Climate. *Constitutional Law Society*, 2(1), 9–17. <https://doi.org/10.36448/cls.v2i2.37>
- Andreadis, I., & Stavrakakis, Y. (2019). Dynamics of Polarization in the Greek Case. *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 681(1), 157–172. <https://doi.org/10.1177/0002716218817723>

- Anisa Agustin, M. R., Handayani, L., Ulfah Haika, N., Putri Herdati, J., & Akbar Hayat, M. (2022). The Practice of Political Dynasty and Kinship in Local Government of Hulu Sungai Utara District. *International Journal of Law, Environment, and Natural Resources*, 2(2), 96–104. <https://doi.org/10.51749/injurlens.v2i2.29>
- Armand, A., Coutts, A., Vicente, P. C., & Vilela, I. (2020). Does information break the political resource curse? Experimental evidence from mozambique. *American Economic Review*, 110(11), 3431–3453. <https://doi.org/10.1257/AER.20190842>
- Asako, Y., Iida, T., Matsubayashi, T., & Ueda, M. (2012). Dynastic Politicians: Theory and Evidence from Japan. *SSRN Electronic Journal*, 201201. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2118350>
- Asif, T., Guangming, O., Haider, M. A., Colomer, J., Kayani, S., & ul Amin, N. (2020). Moral education for sustainable development: Comparison of university teachers' perceptions in China and Pakistan. *Sustainability (Switzerland)*, 12(7). <https://doi.org/10.3390/su12073014>
- Astuti, P. A. S. (2023). Policy incoherence and unwillingness of the Indonesian government to curb its alarming tobacco epidemic. *Tobacco Control*, 32(4), 405–406. <https://doi.org/10.1136/tc-2023-058114>
- Barsegyan, V., Knigge, A., & Maas, I. (2023). Social origin and political participation: does education compensate for or reinforce family advantages and disadvantages? *Acta Politica*, 0123456789. <https://doi.org/10.1057/s41269-023-00296-5>
- Bjarnegård, E., & Zetterberg, P. (2022). How Autocrats Weaponize Women's Rights. *Journal of Democracy*, 33(2), 60–75. <https://doi.org/10.1353/jod.2022.0018>
- Bonotti, M., & Weinstock, D. (2021). Introduction: Parties, Electoral Systems and Political Theory. *Representation*, 57(3), 287–295. <https://doi.org/10.1080/00344893.2021.1960590>
- Cuevas-Rodríguez, G., Pérez-Calero, L., Gomez-Mejia, L., & Kopoboru Aguado, S. (2023). Family Firms' Acquisitions and Politicians as Directors: A Socioemotional Wealth Approach. *Family Business Review*, 36(2), 223–253. <https://doi.org/10.1177/08944865231162404>
- Darmansyah, R., & Syahrani, S. D. (2020). Politik Dinasti. *Journal of Political Issues*, 2(1), 34–46.
- Daron Acemoglu, G. E. (2009). Political selection and persistence af bad goverments. *NBER Working Paper*, 2(5), 255. ???
- Dewi, K. H. (2018). Gender Risk and Femininity: Personal Political Branding of Female Politicians in the Strong Political Dynasty Feature of South Sulawesi. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 9(4). <https://doi.org/10.18196/jgp.9489>
- Dulay, D. C. (2021). Institutional Knowledge at Singapore Management University When running for office runs in the family: Horizontal dynasties , policy and development in the Philippines When Running for Office Runs in the Family : Horizontal Dynasties , Policy and Develop. 1–86.
- Endang Sutrisno, A. P. (2023). Legal Essence of Pancasila As the Basis of the Reality of Indonesian Life: To Improve the Welfare of the Fishing Community. *Russian Law Journal*, 11(9s), 1997–1998. <https://doi.org/10.52783/rlj.v11i9s.1598>
- Fabre, C. (2023). Political corruption in unjust regimes. *European Journal of Political Theory*, 1–7. <https://doi.org/10.1177/14748851231186696>
- Fachrian, S., & Adriadi, A. (2023). Analisis Kinerja Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilkada Tahun 2020 Di Kabupaten Musi Rawas Utara. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)*, 12(1), 1–8. <https://doi.org/10.33366/jisip.v12i1.2540>
- Fasching, N., & Lelkes, Y. (2023). Ancestral Kinship and the Origins of Ideology. *British Journal of Political Science*, 111(2), 1–21. <https://doi.org/10.1017/S0007123422000709>
- Fealy, G. (2020). Jokowi in the Covid-19 Era: Repressive Pluralism, Dynasticism and the Overbearing State. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 56(3), 301–323. <https://doi.org/10.1080/00074918.2020.1846482>

- Ferrali, R., Grossman, G., & Larreguy, H. (2023). Can low-cost, scalable, online interventions increase youth informed political participation in electoral authoritarian contexts? *Science Advances*, 9(26), 1–10. <https://doi.org/10.1126/sciadv.adf1222>
- Fiva, J. H., & Smith, D. M. (2018). Political dynasties and the incumbency advantage in party-centered environments. *American Political Science Review*, 112(3), 706–712. <https://doi.org/10.1017/S0003055418000047>
- Frindiyani, V., Naehu, A. M., & Rosidah, R. (2023). Filsafat Pancasila Sebagai Pedoman Hidup Bangsa Indonesia. *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik*, 6(1), 67–76. <https://doi.org/10.47080/propatria.v6i1.2504>
- Fumarola, A. (2020). The contexts of electoral accountability: Electoral integrity performance voting in 23 democracies. *Government and Opposition*, 55(1), 41–63. <https://doi.org/10.1017/gov.2018.13>
- Harting, V. (2023). An Egalitarian Case for Class-Specific Political Institutions. *Political Theory*, 51(5), 843–868. <https://doi.org/10.1177/00905917231178288>
- Holidin, D. (2022). The Compatibility of Islam and Pancasila in Indonesia’S Declining Democracy. *Politics and Religion Journal*, 16(2), 179–202. <https://doi.org/10.54561/prj1602179h>
- Hudjolly, S. N., & Dewi, R. S. (2023). Pancasila Ideology in Political Education Programs. *AURELIA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 2(2), 793–796. <https://doi.org/10.57235/aurelia.v2i2.730>
- Ilmi, A., Irwan, U., Budi, S., & Wardani, E. (2021). The Women Candidates without Political Kinship Support: What Capitals Should You Utilize to Win The Election? *Proceeding The First International Conference on Government Education Management and Tourism*, 1(1), 210–221. <http://conference.loupiasconference.org/index.php/ICoGEMT/article/view/179>
- Jalalzai, F., & Rincker, M. (2018). Blood is thicker than water: Family ties to political power worldwide. *Historical Social Research*, 43(4), 54–72. <https://doi.org/10.12759/hsr.43.2018.4.54-72>
- James, T. S., Garnett, H. A., Loeber, L., & van Ham, C. (2019). Electoral management and the organisational determinants of electoral integrity: Introduction. *International Political Science Review*, 40(3), 295–312. <https://doi.org/10.1177/0192512119828206>
- Jayanti, M., & Sowiyah, S. (2023). Implementation of Pancasila Ideology in Indonesian Educational Leadership: A Literature Review. *International Journal of Current Science Research and Review*, 06(06), 3148–3153. <https://doi.org/10.47191/ijcsrr/v6-i6-08>
- Kaire, J. (2022). Can’t coalesce, can’t constrain: redefining elite influence in non-democracies. *Political Science Research and Methods*, 1–17. <https://doi.org/10.1017/psrm.2022.44>
- Karimullah, S. S. (2023). Actualization of Pancasila as an Integrative Paradigm in Forming Imagination and Creativity. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 3(1), 11–21. <https://doi.org/10.52738/pjk.v3i1.141>
- Karyono, H., Sukmariningsih, R. M., & Isharyanto, J. E. (2023). Pancasila Ideology as the Basis for Building the Character of the Younger Generation in Indonesia. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 12(3), 319–326. <https://doi.org/10.36941/ajis-2023-0080>
- Kristianita, M. R., & Najicha, F. U. (2022). Implementation of Pancasila Democratic Values in General Elections and Freedom of Expression in Indonesia. *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 14(2), 1. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v14i2.34190>
- Kubin, E., & von Sikorski, C. (2021). The role of (social) media in political polarization: a systematic review. *Annals of the International Communication Association*, 45(3), 188–206. <https://doi.org/10.1080/23808985.2021.1976070>
- Lado, J. (2022). DINASTI POLITIK DALAM KONTESTASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA. *Syntax Idea*, 3(8.5.2017), 2003–2005.
- Lewis, B. D. (2023). Indonesia’s New Fiscal Decentralisation Law: A Critical Assessment. *Bulletin of Indonesian*

- Economic Studies, 59(1), 1–28. <https://doi.org/10.1080/00074918.2023.2180838>
- Liddle, R. W., Mujani, S., & Irvani, D. (2022). Support for Family Politics and Democracy: Evidence from Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI)*, 3(2), 47–55. <https://doi.org/10.15408/jisi.v3i2.29670>
- Maftuh. (2022). Politisasi Islam Pada Masa Kesultanan Banten. *Tamaddun*, 10(2).
- Mantzaris, A. V., & Domenikos, G. R. (2023). Exploring the entropic nature of political polarization through its formulation as a isolated thermodynamic system. *Scientific Reports*, 13(1), 1–11. <https://doi.org/10.1038/s41598-023-31585-w>
- Marbun, M. B. H., Susalit, E., Susilowati, U., & Andina, T. (2022). Long-term outcomes and prognostic factors in kidney transplant recipients in Jakarta, Indonesia: a cohort study. *BMJ Open*, 12(5), 1–7. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2021-059631>
- Maulida, S. Z., Xavier, M., & Elliot, M. (2023). The Essence of Pancasila as the Foundation and Ideology of the State: The Values of Pancasila. *International Journal of Educational Narratives*, 1(2), 84–92. <https://doi.org/10.55849/ijen.v1i2.303>
- Meliala, F. C. D., & Permana, P. A. (2023). Competitive Threats to Political Dynasty in Indonesia: The Failure of the Yasin Limpo Family in the 2018 South Sulawesi Gubernatorial Election. *Jurnal Politik*, 9(1), 1–31. <https://doi.org/10.7454/jp.v9i1.1139>
- Muqsith, M. A., Muzykant, V. L., Tayibnapis, R. G., & Pratomo, R. R. (2022). Revolutionizing Pancasila as the ideology of Indonesians. *RUDN Journal of Sociology*, 22(4), 860–871. <https://doi.org/10.22363/2313-2272-2022-22-4-860-871>
- Mutahir, A., Puspitasari, E., Rostikawati, R., Rizkidarajat, W., & Ihsan, A. (2023). Perubahan Nilai Anak di Banyumas. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 6(2), 437–453. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v6i2.2480>
- Ngesthi, Y. S. E., Anjaya, C. E., Saptorini, S., Arifianto, Y. A., & Triposa, R. (2023). Synergy of Pancasila Humanism and Theological Ethics: The Foundation for Building a Digital Culture towards the unity of the Indonesian Nation. *Pharos Journal of Theology*, 104(2). <https://doi.org/10.46222/PHAROSJOT.104.26>
- Nugraheni, S. D., Angel, V., Puspita, V. H., Santi, W. N., & Fitriono, R. A. (2023). Pancasila as an Ethical System. *JETISH: Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health*, 1(2), 196–200. <https://doi.org/10.57235/jetish.v1i2.126>
- Nurdin, I., Suaib, E., Zuada, L. H., & Rompo Banne, I. (2017). Filipinization of Indonesian Politics: Politics of Family Formation in Southeast Sulawesi. *Scientific Journal of PPI - UKM*, 3(7), 333–340. <https://doi.org/10.27512/sjppi-ukm/ses/a09062017>
- Oliveira, S. L. da C., & Souza, W. P. S. de F. (2022). Political Dynasties and Corruption: Evidence from Brazil. *Research Square*. <https://app.dimensions.ai/details/publication/pub.1149260650%0Ahttps://www.researchsquare.com/article/rs-1795376/latest.pdf>
- Paricio-Esteban, M. P., Puchalt-López, M., García-Alcober, M. P., & Nicasio-Varea, B. (2023). Political parties' influence on the transparency and participation of Spanish municipal websites: the case of Catalonia, the Community of Madrid, the Community of Valencia, and the Region of Murcia. *Profesional de La Informacion*, 32(1), 1–17. <https://doi.org/10.3145/epi.2023.ene.20>
- Pelzl, P., & Poelhekke, S. (2023). Democratization, leader education and growth: firm-level evidence from Indonesia. *Journal of Economic Growth*, 28(4), 571–600. <https://doi.org/10.1007/s10887-022-09221-5>
- Permana, D. (2023). Political Dynasties in the Government System in Indonesia. *Ministrate: Jurnal Birokrasi Dan Pemerintahan Daerah*, 5(3), 153–163.
- Prabowo, H., & Hartati, S. (2019). Dynasty Politics in Succession of Village Leadership: A Case Study in the Village of Cileunyi Wetan, Indonesia. *International Journal of Science and Society*, 1(3), 80–86. <https://doi.org/10.54783/ijssoc.v1i3.31>
- Putri, R. W., Sabatira, F., Davey, O. M., Saputra, M. F., & Natamiharja, R. (2023).

- Indonesia's Democracy and Constitution: Reflecting Human Rights Based on Pancasila. *Journal of Law and Policy Transformation*, 7(2), 100. <https://doi.org/10.37253/jlpt.v7i2.7235>
- Rusnaedy, Z., Fatma, F., & Haris, A. (2021). Political Dynasty and Single Candidate in Indonesian Local Elections: Where Are The Parties? *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 3(2), 124–136. <https://doi.org/10.47650/jglp.v3i2.297>
- Samosir, O. B., Radjiman, D. S., & Aninditya, F. (2023). Food consumption diversity and nutritional status among children aged 6-23 months in Indonesia: The analysis of the results of the 2018 Basic Health Research. *PLoS ONE*, 18(3 March), 1–13. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0281426>
- Santika, I. G. N., I Made Kartika, I Gede Sujana, & Ni Made Adhi Dwindayani. (2023). The Dynamic History of the Journey of Pancasila as the Foundation of the Indonesian State. *Journal of Sustainable Development Science*, 5(1), 25–32. <https://doi.org/10.46650/jsds.5.1.1432.25-32>
- Sekaringtias, A., Verrier, B., & Cronin, J. (2023). Untangling the socio-political knots: A systems view on Indonesia's inclusive energy transitions. *Energy Research and Social Science*, 95(May 2022), 102911. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2022.102911>
- Sembiring, W. M., Subhilhar, Kusmanto, H., & Ridho, H. (2023). The Politicization of Religion and Polarization of Hate in the 2018 North Sumatra Regional Head Election Indonesia. *Pharos Journal of Theology*, 104(3), 1–10. <https://doi.org/10.46222/pharosjot.104.328>
- Setiawan, H., & Sa'diyah, K. (2021). The Strength of the Kinship Politics Network and Modalities of Pilar Saga in the 2020 South Tangerang Regional Head Election. *Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies*, 1(2), 119–130. <https://doi.org/10.53013/bestuurskunde.1.1.119-130>
- Shi, C., Dutt, A., Jacquez, F., & Wright, B. (2023). Transformative impacts of a civic leadership program created by and for refugees and immigrants. *Journal of Community Psychology*, 51(5), 2300–2318. <https://doi.org/10.1002/jcop.23028>
- Silitonga, M. S., Wittek, R., Snijders, T. A. B., & Heyse, L. (2023). Democratizing corruption: a role structure analysis of Indonesia's "Big Bang" decentralization. *Applied Network Science*, 8(1). <https://doi.org/10.1007/s41109-023-00535-w>
- Soemantri, D., Findyartini, A., Yolanda, S., Morley, E., & Patterson, F. (2022). Evaluation of Situational Judgment Tests in student selection in Indonesia and the impact on diversity issues. *BMC Medical Education*, 22(1), 1–10. <https://doi.org/10.1186/s12909-022-03247-4>
- Sukti, S., Warsito, T., Qodir, Z., & Jubba, H. (2022). Political Dynamics of Islamic Law in the Reform Era: A Study of the Response of Muhammadiyah Cadres in Central Kalimantan. *Samarah*, 6(2), 1022–1045. <https://doi.org/10.22373/sjhh.v6i2.12415>
- Supratikno, A. (2022). Reviewing Identity Politics from Pancasila Democracy. <https://doi.org/10.4108/eai.15-9-2021.2315573>
- Suwignyo, A., & Yuliantri, R. D. A. (2023). An Analysis of the Discursive Gap in the Ideas and Practices of Musyawarah Mufakat in the Indonesian Nation-State Formation, 1900-1980s. *Paramita*, 33(1), 1–15. <https://doi.org/10.15294/paramita.v33i1.41514>
- Tedla, W. T., & Mekonen, K. D. (2023). Inheritance-induced familial disputes in north-west Ethiopia: the role of legal-policy gaps and aggravating socio-economic dynamics. *Humanities and Social Sciences Communications*, 10(1), 1–10. <https://doi.org/10.1057/s41599-023-01558-5>
- Teney, C., Dochow-Sondershaus, S., & Lovette, F. (2024). The Gendered Effect of Parenthood on Voting Behaviour in the 2021 German Federal Election. *German Politics*, 33(1), 22–45. <https://doi.org/10.1080/09644008.2023.2196410>
- Tyson, A., & Nawawi. (2022). Dictators Never Die: Political Transition, Dynastic Regime Recovery and the 2021 Suharto Commemoration in Indonesia.

- Contemporary Southeast Asia, 44(3), 421–452. <https://doi.org/10.1355/cs44-3i>
- Vasist, P. N., Chatterjee, D., & Krishnan, S. (2023). The Polarizing Impact of Political Disinformation and Hate Speech: A Cross-country Configurational Narrative. *Information Systems Frontiers*, 0123456789. <https://doi.org/10.1007/s10796-023-10390-w>
- Wang, W., Hoang, A. P., & Jordan, L. P. (2023). The intimate affliction of vicarious racialization: Afro-Chinese couples in South China. *Inter-Asia Cultural Studies*, 24(3), 397–412. <https://doi.org/10.1080/14649373.2023.2209425>
- Weiss, J. (2023). Intergenerational transmission of left-right ideology: A question of gender and parenting style? *Frontiers in Political Science*, 5. <https://doi.org/10.3389/fpos.2023.1080543>
- Wirasaputra, B., & Satria, A. B. (2023). Making Inheritance Certificate Studied from the Philosophy of Pancasila. *International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis*, 06(06), 2822–2828. <https://doi.org/10.47191/ijmra/v6-i6-83>